

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

5.1. Prioritas dan Arah Kebijakan RKPD Tahun 2013

5.1.1. Prioritas dan Arah Kebijakan Spasial

Arah kebijakan spasial akan berintegrasi dengan kebijakan sektoral untuk mewujudkan harmonisasi pembangunan wilayah yang dilaksanakan secara sektoral oleh SKPD maupun pelaku pembangunan lainnya. Arah Kebijakan spasial Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur. Secara umum dan ringkas, arah kebijakan spasial meliputi struktur dan pola ruang serta pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jawa Timur.

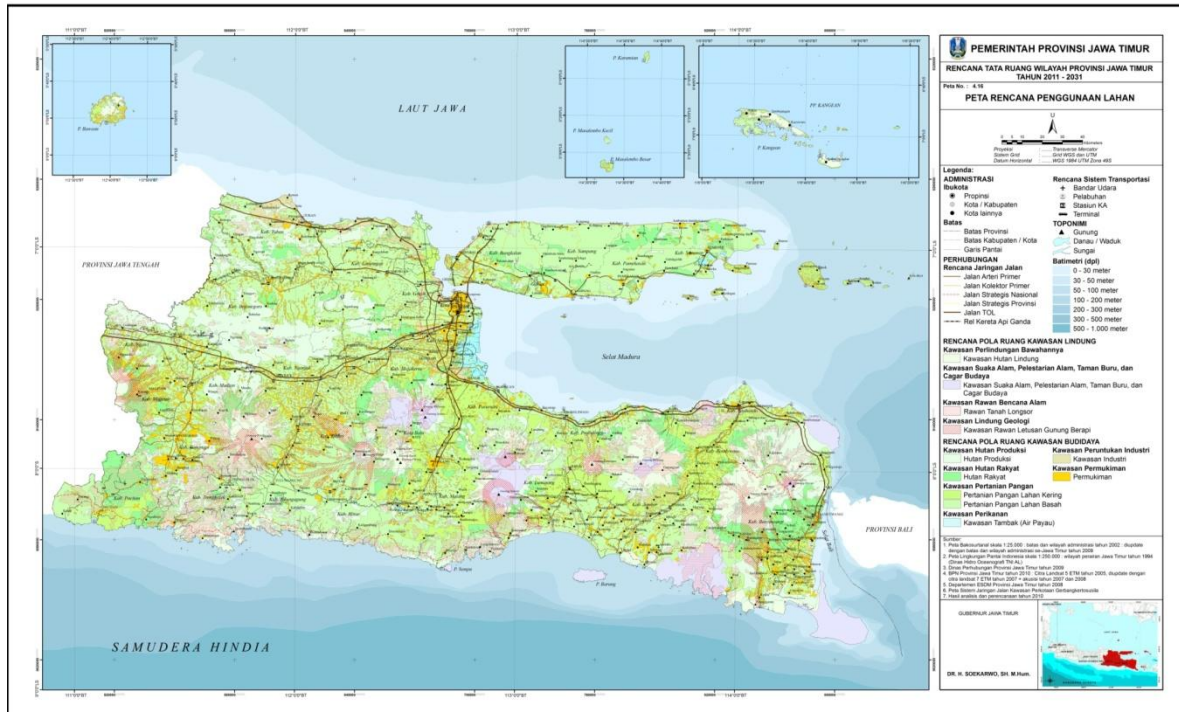
Arahan kebijakan struktur ruang yang pada prinsipnya telah diuraikan pada prioritas pembangunan sektoral terutama pada bidang prasarana wilayah (Sistem Transportasi, Prasarana Sumberdaya Air, Energi dan Prasarana Lingkungan) Sedangkan arah kebijakan pola ruang secara ringkas dapat digambarkan seperti pada tabel dan gambar sebagai berikut :

Tabel 5.1. Rencana Penggunaan Lahan di Jawa Timur Sampai Tahun 2013

No.	Arahan Penggunaan Lahan	Rencana (Ha)	Prosentase
A.	KAWASAN LINDUNG		
1	Hutan Lindung	315.505,30	6,60
2	Hutan Konservasi		
	1) Suaka Margasatwa	18.009,00	0,38
	2) Cagar Alam	10.957,00	0,23
	3) Taman Nasional	176.696,20	3,70
	4) Taman Hutan Raya	27.868,30	0,58
	5) Taman Wisata Alam	298,00	0,01
B.	KAWASAN BUDIDAYA		
1	Kawasan Hutan Produksi	815.062,02	17,05
2	Kawasan Hutan Rakyat	425.570,43	8,90
3	Kawasan Pertanian		
	1) Pertanian Lahan Basah	957.239,00	20,03
	2) Pertanian Lahan Kering/Tegalan/Kebun Campur	849.033,00	17,76
4	Kawasan Perkebunan	398.036,00	8,33
5	Kawasan Industri	69.742,00	1,46
6	Kawasan Pemukiman	715.958,75	14,98
	T O T A L	4.779.975,00	100,00

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2031

Gambar 5.1. Peta Rencana Penggunaan Lahan Jawa Timur



Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah (Perkembangan Pusat Pengembangan Wilayah)

Sebagai prioritas kebijakan spasial yang hendak diwujudkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam RTRW ditetapkan dalam pengembangan Kawasan Strategis. Kawasan strategis propinsi perlu diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/lingkungan hidup. Mengingat hingga dibuatnya dokumen RKPD tahun 2013 ini, RTRW belum ditetapkan dalam peraturan daerah, maka penetapan jenis dan lokasi kawasan dimaksud didekati dari dokumen draft naskah akademis RTRW Tahun 2011-2031.

Adapun jenis kawasan strategis Provinsi Jawa Timur meliputi:

- (1) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi :
 - a. Rencana kawasan strategis yang berada dalam lingkup pengelolaan pemerintah pusat terdiri atas kawasan Germakertosusila (Gresik, Madura, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) sebagai KSN.
 - b. Rencana kawasan strategis yang berada dalam lingkup pengelolaan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai KSP meliputi:
 1. Kawasan industri berteknologi tinggi di Kota Surabaya dan di Kabupaten Sidoarjo;

2. Kawasan ekonomi unggulan terdiri atas LIS (Lamongan Integrated Shorebase) di Kabupaten Lamongan, kawasan ekonomi Madura di Kabupaten Bangkalan, kawasan ekonomi di Kabupaten Malang, dan Industri Perhiasan Gemopolis di Kabupaten Sidoarjo;
 3. Kawasan agropolitan regional yang terdiri atas Sistem Agropolitan Wilis, Sistem Agropolitan Bromo - Tengger - Semeru, Sistem Agropolitan Ijen, dan Sistem Agropolitan Kepulauan Madura;
 4. Kawasan agroindustri, yaitu Agroindustri Gelang (Gresik dan Lamongan) Utara;
 5. Kawasan koridor metropolitan meliputi kawasan di kaki Jembatan Suramadu di Kabupaten Bangkalan, kaki Jembatan Suramadu di Kota Surabaya, kawasan pusat bisnis Surabaya, kawasan industri berteknologi tinggi di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, Kawasan Industri Gempol di Kabupaten Pasuruan, Kawasan Komersial Lawang di Kabupaten Malang, dan perkotaan Malang, CBD Kota Malang, pusat pariwisata di Kota Batu;
 6. Kawasan perbatasan antarprovinsi, yaitu Provinsi Jawa Timur - Jawa Tengah - DI Yogyakarta dilakukan melalui kerja sama regional meliputi Ratubangnegoro (Kabupaten Blora, Kabupaten Tuban, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Bojonegoro), Karismapawirogo (Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Ponorogo), Pawonsari (Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Wonosari), dan Golekpawon (Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Wonogiri);
 7. Kawasan perbatasan antarkabupaten/kota meliputi Germakertosusila dan segitiga emas pertumbuhan Tuban - Lamongan - Bojonegoro; dan
 8. Kawasan tertinggal berupa kabupaten/kota dengan keberadaan desa-desa tertinggal yang di dalamnya memiliki pengaruh signifikan terhadap pemerataan dan pertumbuhan ekonomi wilayah kota/kabupaten dan provinsi yang penyebarannya meliputi Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Bondowoso.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, meliputi rencana kawasan strategis yang berada dalam lingkup pengelolaan pemerintah pusat, terdiri atas kawasan perbatasan negara pulau kecil terluar yang

berhadapan dengan laut lepas di Provinsi Jawa Timur meliputi Pulau Barung, Sekel, dan Panehan sebagai KSN.

- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagai KSP, meliputi:
 - a. Majapahit Park di Kabupaten Mojokerto; dan
 - b. Bromo - Tengger - Semeru beserta pemukiman adat suku Tengger di Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Lumajang.
- (4) Kawasan Strategis dari sudut SDA dan/atau kepentingan teknologi tinggi, meliputi :
 - a. Kawasan strategis yang berada dalam lingkup pengelolaan pemerintah pusat, yaitu kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Watukosek di Kabupaten Pasuruan sebagai KSN;
 - b. Kawasan strategis yang berada dalam lingkup pengelolaan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai KSP, terdiri atas:
 1. Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi meliputi Sidoarjo dan sekitarnya, Gresik dan sekitarnya, Tuban dan sekitarnya, Bangkalan dan sekitarnya, Bojonegoro dan sekitarnya, serta Sumenep dan sekitarnya;
 2. Kawasan Pembangkit PLTG, PLTU, dan PLTD meliputi Paiton di Kabupaten Probolinggo, Singosari di Kabupaten Gresik, Lekok di Kabupaten Pasuruan, Tanjung Awar-awar di Kabupaten Tuban, dan Ngadirojo di Kabupaten Pacitan; dan
 3. Kawasan pengembangan potensial panas bumi, meliputi Ngebel - Wilis di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Madiun, Gunung Arjuno Welirang di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Malang, Tiris (Gunung) Lamongan di Kabupaten Probolinggo dan kabupaten Lumajang, Belawan - Ijen di Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Banyuwangi, Argopuro di Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Jember, dan Cangar di Kabupaten Malang.
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, meliputi : rencana kawasan strategis yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, sebagai KSP, yakni WS Bengawan Solo dan WS Brantas.

Kebijakan dan strategi spasial Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam jangka menengah berdasarkan dokumen RTRW dapat diformulasikan ringkas sebagai berikut:

- 1). Pengembangan kawasan dalam upaya mengurangi kesenjangan wilayah melalui pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan sehingga terciptanya pusat-pusat pelayanan baru yang tersebar pada seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur dan dapat menjadi pusat pertumbuhan baru bagi kawasan yang selama ini tidak terlayani oleh pusat pelayanan yang ada.
- 2). Pengembangan infrastruktur yang diarahkan untuk menjamin aksesibilitas disetiap pusat produksi, pusat konsumsi, pusat distribusi dan kawasan terbelakang serta pusat-pusat perkotaan di Provinsi Jawa Timur.
- 3). Pengembangan kawasan strategis provinsi yang diharapkan akan memberikan pengaruh besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sosial-budaya serta pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik.
- 4). Pengembangan wilayah tetap memperhatikan batasan wilayah dengan fungsi lindung. Pengembalian fungsi lindung menjadi fokus utama dalam menjaga daya dukung lingkungan agar tetap stabil.
- 5). Pengembangan wilayah yang membutuhkan kerja sama antar wilayah

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur pada tahapan pertama tahun 2010-2014 lebih ditujukan untuk mencapai target :

- 1) Peningkatan fungsi dan skala infrastruktur utama dan pendukung fungsi PKN dan PKW
- 2) Pengembangan transportasi untuk mendukung pengembangan 31 kecamatan sentra produksi agropolitan serta sentra produksi sumber daya alam lainnya dalam kawasan strategis ekonomi dan kawasan andalan yang dikaitkan dengan simpul/pusat pengembangannya berupa pengembangan jalan bebas hambatan, jaringan jalan arteri, jaringan jalan kolektor, jaringan jalan strategis nasional, jaringan kereta api, pelabuhan dan bandar udara untuk mendukung sentra produksi yang dikaitkan dengan 38 simpul- simpul/kota pengembangannya
- 3) Pengembangan transportasi antarpulau untuk mendukung penanganan kawasan tertinggal Kepulauan Madura
- 4) Pembentukan cluster-cluster produk unggulan pertanian cikal bakal agropolitan
- 5) Mengamankan lahan produktif pertanian untuk mencegah/mengendalikan konversi lahan pertanian produktif dan beririgasi teknis.
- 6) Merehabilitasi kerusakan *catchment* area dan sumber air

- 7) Mempertahankan sumber air dan merehabilitasi daerah resapan untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun
- 8) Penetapan dan pengembangan kawasan-kawasan strategis
- 9) Mengintegrasikan kegiatan industri ke dalam zona/kawasan industri yang telah ditetapkan